

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Klientelisme merupakan suatu fenomena yang masih melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia yang secara khusus lekat dengan konteks elektoral dan kedaerahan. Dalam perjalanan pilkada sampai saat ini, praktik politik klientelistik masih sangat kental mewarnai dinamika politik di daerah. Praktik ini biasanya ditandai adanya penguasaan sumberdaya politik oleh minoritas elite, terutama elite lokal. Pada saat yang sama tampak ketergantungan klien terhadap sumberdaya tersebut. Alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya publik kemudian lebih merupakan bentuk pertukaran antara kedermawanan sang patron dengan loyalitas politik sang klien.

Klientelisme politik terjadi ketika para pemilih, para pegiat kampanye atau aktor-aktor lain menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi tersebut menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang, atau uang tunai kepada para pemilih baik individual maupun kelompok-kelompok kecil. Pada masa pemilihan umum, kebanyakan calon membentuk organisasi non-partai untuk menjaring suara yang dikenal dengan sebutan tim sukses yang kadang memanfaatkan kader-kader partai namun lebih sering bergantung pada tokoh atau pemuka masyarakat dan para warga yang tidak terafiliasi dengan partai.

Pada pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Pemuda Pancasila Labuhanbatu merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan ikut mengambil peran sebagai bagian dari kelompok pemenang dalam kontestasi. Keterlibatan Pemuda Pancasila ditandai dengan adanya deklarasi dukungan yang diberikan kepada pasangan calon gubernur Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Setelah memberikan deklarasi dukungan kepada pasangan Edy-Musa, Pemuda Pancasila Labuhanbatu juga melakukan mobilisasi massa untuk memenangkan pasangan tersebut. Mobilisasi yang dilakukan Pemuda Pancasila dengan mobilisasi internal seperti kader dan anggota serta organisasi-organisasi sayap seperti Sapma (satuan pelajar dan mahasiswa) Pemuda Pancasila.

Pada proses pemenangan calon gubernur, relasi jaringan Pemuda Pancasila Labuhanbatu sebagai klien dan dipimpin oleh seorang wakil bupati pada saat itu yang sekaligus sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila, juga mendapatkan imbalan yang dikenal sebagai pertukaran dalam bentuk klientelistik. Rangsangan pemberian materi sebagai imbalan yang nantinya akan didapatkan kader ini diberikan Ketua MPC Pemuda Pancasila kepada jajaran struktur kepengurusan dan juga kepada ketua-ketua organisasi sayap serta seluruh kader yang terlibat dalam tim internal bentukan Pemuda Pancasila. Materi yang diberikan dalam bentuk kesejahteraan bagi kader berupa pemberian pekerjaan, pemberian bantuan dalam bidang pendidikan dan terkadang juga pemberian sejumlah uang dengan bentuk pendanaan kegiatan organisasi pada saat proses pemilihan berlangsung. Rangsangan pemberian materi ini membentuk rasa

loyalitas dan militansi yang dimiliki kader Pemuda Pancasila kepada elite yang telah memberikan materi tersebut, sehingga ketika elite memberikan instruksi untuk melakukan dukungan kepada pasangan calon gubernur yang didukung, maka kader akan ikut turut dengan instruksi diberikan.

Pemanfaatan relasi hubungan ini juga berlanjut pada keterlibatan jajaran pemerintahan desa yang diisi oleh kader-kader Pemuda Pancasila sebagai kepala desa untuk ikut serta memenangkan perolehan suara serta menjamin pilihan masyarakat desa tersebut bermuara kepada pasangan calon yang didukung Pemuda Pancasila. Pada proses pemenangan, kepala desa yang juga kader Pemuda Pancasila menjadi ketua tim pemenangan internal. Pola relasi hubungan klientelistik seperti ini, menyebabkan munculnya jejaring pemilih dikalangan masyarakat desa yang dipengaruhi sosok kepala desa sebagai bagian dari tim pemenangan.

Pendanaan tim internal Pemuda Pancasila untuk melaksanakan agenda kampanye dan pemenangan lainnya didapatkan dari pemberian Ketua MPC Labuhanbatu. pemberian dana untuk tim internal Pemuda Pancasila berasal dari keuangan Ketua MPC Labuhanbatu. Selaku ketua, Andi Suhaimi Dalimunthe menjadi penanggung jawab akan ketersediaan dana untuk biaya pelaksanaan kegiatan pemenangan. Sehingga tim internal Pemuda Pancasila dapat berjalan seperti yang telah ditentukan dalam melaksanakan agenda kampanye. Pemberian dana ini didasari atas pemberian personal Ketua MPC yang bersumber dari keuangan organisasi dan tidak adanya aliran dana yang didapatkan dari tim sukses partai koalisi.

Pertukaran klientelistik juga didapatkan Pemuda Pancasila setelah pemilihan gubernur selesai. Pemberian dana hibah yang diterima Pemuda Pancasila melalui anggaran APBD Kabupaten Labuhanbatu, diberikan Plt Bupati yang pada sebelumnya tidak pernah didapatkan. Adanya pemberian dana hibah ini, bertujuan untuk dijadikan keuangan organisasi sehingga dapat menggerakkan roda organisasi dalam menjalankan agenda-agenda kegiatan. Pemuda Pancasila menerima dana hibah terbesar di antara ormas-ormas yang ada di lingkup Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian pemberian manfaat klientelistik seperti pemberian bantuan, uang tunai dan pengadaan pemberian lapangan pekerjaan yang bersifat personal juga diterima anggota-anggota Pemuda Pancasila.

6.2 Saran

Melalui hasil pembahasan dan analisis temuan lapangan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran yang dapat dilakukan mengenai klientelisme politik yang terjadi pada pemilihan kepala daerah yang melibatkan peran organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis massa, khususnya Pemuda Pancasila:

1. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan yang terkandung didalamnya, maka dari itu peneliti memberikan saran agar dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya sekiranya dapat melihat klientelisme politik yang terjadi pada saat pilkada dari sudut pandang yang

lebih luas. Karena penelitian ini belumlah sempurna secara menyeluruh dalam menganalisis perilaku klientelisme politik di internal Pemuda Pancasila.

2. Kepada anggota Pemuda Pancasila

Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam kemenangan calon gubernur Sumatera Utara setidaknya memiliki pengaruh terhadap perolehan suara yang didapat pasangan calon yang didukung. Dengan demikian, peran Pemuda Pancasila dalam pusingan politik praktis di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, telah memiliki posisi tawar dengan memiliki basis massa yang besar di dalam keanggotaan Pemuda Pancasila itu sendiri. Hal ini menjadikan Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang akan dilirik calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi politik nantinya.

